



DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon. (021) 5264516/17 Ext: 209 Faksimili. (021) 5205310
Laman: www.djpp.kemenumham.go.id
Email: harmonisasi.kumham@gmail.com

Jakarta, 1 November 2021

Nomor : PPE.3.PP.02.03-17
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan konfirmasi dan masukan terhadap matriks Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021-2024

Kepada Yth.

Kepala Biro Hukum/Pimpinan unit yang menyelenggarakan fungsi dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan
Kementerian/Lembaga terlampir
di-
Jakarta

Berdasarkan Rapat tim kecil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021-2024 pada tanggal 27 s.d 28 Oktober 2021, bersama ini dengan hormat dapat kami sampaikan bahwa dalam rapat pengharmonisasian beberapa substansi yang diatur dalam RPerpres tersebut telah dibahas dan disepakati. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan permohonan konfirmasi khususnya terkait aksi dan target kementerian/lembaga sebagaimana tercantum dalam Matriks RAN PPTPPO di BAB II lampiran RPerpres tentang Rencana Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021-2024 (sebagaimana terlampir).

Kami berharap setiap kementerian/lembaga dapat memberikan konfirmasi dan masukan paling lambat pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, dikarenakan kami akan segera menyelesaikan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPerpres dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Kepala Biro Hukum/pimpinan unit yang menyelenggarakan fungsi dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan I,

Dr. Roberia, S.H., M.H.
NIP. 197004232005011007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
(sebagai Laporan)

Lampiran Surat

Nomor : PPE.3.PP.02.03-12

Tanggal : 1 November 2021

DAFTAR TUJUAN PERMOHONAN

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Luar Negeri;
5. Kementerian Agama;
6. Kementerian Perhubungan;
7. Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Kementerian Kesehatan;
9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
11. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
12. Kementerian PPN/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
13. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
16. Tentara Nasional Indonesia;
17. Kepolisian Republik Indonesia;
18. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
19. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
20. Badan Intelijen Negara;
21. Badan Keamanan Laut;
22. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020-2024

Sub Gugus Tugas: Pencegahan TPPO

Koordinator: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Belum semua kementerian/ lembaga dan daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam rencana kerja dalam upaya pencegahan TPPO. 2. Masih mudah terjadinya pemalsuan identitas dan dokumen calon tenaga kerja yang berpotensi TPPO, meskipun sudah diberlakukan e-KTP. 3. Belum maksimal peran dan	1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pencegahan TPPO secara efektif dan berdampak. 2. Meningkatkan kualitas dan cakupan program dan kegiatan pencegahan TPPO di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3. Meningkatkan deteksi dini Pemohon Paspor terduga Pekerja Migran	a. Jumlah kebijakan teknis yang disusun bagi upaya pencegahan.	1) Penyusunan kebijakan yang diperlukan terkait dengan pencegahan TPPO.		2	2	2	2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2) Penyusunan kebijakan standardisasi dan pengawasan untuk pelaksanaan pelatihan kerja calon PMI sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan di setiap sektor pekerjaan di negara tujuan termasuk <i>soft skills</i> .			Persiapan awal kebijakan	Diseminasi Finalisasi Kebijakan	Pelaksanaan Kebijakan	Kementerian Ketenagakerjaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
koordinasi Sub Gugus Tugas di kementerian/ lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing. 4. Belum maksimal upaya sosialisasi dan advokasi tentang TPPO melalui jejaring masing-masing.	Indonesia-Nonprosedural (PMI-NP). 4. Meningkatkan pengawasan keimigrasian bagi masyarakat terduga PMI-NP yang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). 5. Memantau Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya berpotensi terjadi TPPO. 6. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan Lembaga masyarakat.		3) Pengembangan kebijakan dan instrumen pemantauan untuk pelaksanaan standar dan layanan perusahaan penempatan pekerja, BLKLN/ LPK yang bebas dari risiko TPPO, pelanggaran hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan.			1 paket (dokumen , SOP)			Kementerian Ketenagakerjaan
			4) Pengembangan kebijakan dan instrumen untuk penerapan standar dan kriteria termasuk <i>system black listing</i> untuk perusahaan asing di negara tujuan yang ingin			1 paket (dokumen , SOP)			Kementerian Ketenagakerjaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	7. Melibatkan PATBM, Forum Anak Nasional, Forum Anak Provinsi, Forum Anak Kabupaten/ Kota, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Desa/ Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor bidang TPPO.		berkerjasama dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).						
			5) Pelaksanaan deteksi dini pencegahan TPPO melalui: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi prosedur penempatan CPMI. ✓ Pengawasan pemenuhan dokumen CPMI. ✓ Pengawasan terhadap proses penempatan PMI oleh lembaga Penempatan PMI ✓ Pencegahan penggunaan tenaga kerja 	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kementerian Ketenagakerjaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			anak oleh perusahaan.						
			6) Pengefektifan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengembangan kebijakan dan instrumen pengawasan untuk terhadap P3MI, <i>Manning Agents</i> dan Perusahaan, yang diduga mempekerjakan perempuan dan anak.	1 paket (dokumen, SOP)	1 paket (dokumen, SOP)	1 paket (dokumen, SOP)	1 paket (dokumen, SOP)	1 paket (dokumen, SOP)	Kementerian Ketenagakerjaan
			7) Kebijakan untuk kewajiban melakukan deteksi dini kerentanan menjadi korban TPPO melalui pemeriksaan Psikologis untuk kelompok berisiko tinggi		Pertemuan awal – pakar	Penerbitan Kebijakan	Sosialisasi Kebijakan	Pemantauan Pelaksanaan kebijakan	Kementerian Kesehatan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			antara lain pekerja migran/ pekerja lokal- pekerja seni.						
			8) Penyusunan pedoman praktik kerja lapangan bagi peserta didik SMK/ MAK di luar negeri.	Penyusunan draf	Finalisasi Pedoman Diseminasi	Pelaksanaan Pedoman	Pelaksanaan Pedoman	Pemantauan Pelaksanaan Pedoman	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Penanggung Jawab) • Kementerian Agama • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			9) Penyusunan pedoman magang bagi mahasiswa di luar negeri.		Penyusunan Draf	Finalisasi Pedoman dan Diseminasi	Pelaksanaan Pedoman	Pemantauan Pelaksanaan Pedoman	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Penanggung Jawab) • Kementerian Luar Negeri

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		b. Penerbitan aturan turunan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.	1) RPP Pelindungan Pelaut Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan.		RPP sudah di Sekneg	RPP sudah di Sekneg			Kementerian Ketenagakerjaan (Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
			2) Peraturan BP2MI tentang Pelaksanaan Pengawasan pelayanan BPJS TK PMI.		Draft	Harmonisasi dan finalisasi			Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		c. Implementasi HAM Perikanan.	Sinkronisasi Kewenangan Pengawasan dan Pemeriksaan HAM di Kapal Perikanan dan Unit Pengolahan Ikan.			1 kali	1 kali	1 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Perhubungan • Kementerian Ketenagakerjaan
		d. Adanya pemetaan mengenai kerentanan TPPO secara nasional berdasarkan cakupan geografis yakni	1) Pemetaan situasi kerentanan TPPO di Indonesia berdasarkan kondisi geografis, keagamaan, adat/ budaya,	1		1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Sosial • Kementerian Agama • Kementerian Kelautan dan Perikanan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		daerah asal, transit dan tujuan, termasuk kontribusi norma sosial, adat, budaya serta faktor lainnya yang berkontribusi pada TPP.	gender, norma sosial, pendidikan, kemiskinan, dll.			1 dok.		1 dok.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
			2) Penyuluhan sosial terhadap PMI dan Keluarga dan komunitas dari PMI.	1	1	1	1	1	Kementerian Sosial
		e. Jumlah masyarakat yang sadar dan berperan aktif dalam pencegahan TPPO, baik pelajar, aparatur pemerintah, orang tua, ormit, tokoh agama, penyuluh agama, dan penghulu, tokoh masyarakat di daerah kantong-kantong pekerja migran, daerah transit, daerah	1) Sosialisasi bahaya TPPO di daerah asal, transit, tujuan dan daerah dengan potensi wisata.	20 Kab/ Kota	20 Kab/ Kota	20 Kab/ Kota	20 Kab/ Kota	20 Kab/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Agama • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			2) Sosialisasi bahaya TPPO bagi Tokoh Agama, Penyuluh Agama,		200 orang	400 orang	400 orang	400 orang	Kementerian Agama

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		perbatasan, daerah tujuan, dan daerah tujuan wisata.	Penghulu, dan Ormas Keagamaan.						
			3) Pemberdayaan PMI dalam peningkatan <i>skill</i> di potensi wilayah daerah PMI (dari Rehabsos RSTS & KPO Kemensos).		1 prov	1 prov	1 prov	1 prov	Kementerian Sosial
			4) Sosialisasi bahaya TPPO di sektor perikanan.			3 prov	3 prov	3 prov	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			5) Penyusunan Buku panduan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.		1 buku				Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			6) pengembangan program pemberantasan TPPO di tingkat desa melalui		1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			penguatan aparaturnya desa.						
			7) mendorong pembangunan ekonomi melalui UMKM di tingkat pedesaan		1 paket (juknis, pelatihan)	1 paket (juknis, pelatihan)	1 paket (juknis, pelatihan)	1 paket (juknis, pelatihan)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			8) Pembentukan <i>Community Watch</i> di tingkat desa (Diintegrasikan dengan Desa RPPA, Desa Wisata Ramah Anak bebas Eksploitasi, Desa Ramah Anak bebas Kekerasan dan Desa Anak Bebas Pronografi).		2 Prov/ Kab/ Kota	2 Prov/ Kab/ Kota	2 Prov/ Kab/ Kota	2 Prov/ Kab/ Kota	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			9) Penyuluh Sosial Masyarakat dan Relawan Masyarakat di tingkat desa di	3 kegiatan	41 kegiatan	41 kegiatan	41 kegiatan	41 kegiatan	Kementerian Sosial

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			kantong-kantong daerah TPPO.						
			10) Pembentukan Satgas TPPO di desa kantong PMI.	25	2	2	2	2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			11) Pembentukan Relawan Sosial.			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kementerian Sosial
			12) Promosi <i>The Code</i> dan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada pelaku usaha kepariwisataan dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi serta Pencegahan dan Penanganan TPPO.		1 paket (dokumen , SOP)	1 paket (dokumen , SOP)	1 paket (dokumen , SOP)	1 paket (dokumen , SOP)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			13) Penyuluhan sosial terhadap PMI, Keluarga,	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	Kementerian Sosial

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			dan Komunitas PMI.						
			14) Penguatan keluarga melalui psikoedukasi di fasilitas pelayanan Kesehatan Primer, Instansi/ Lembaga/ organisasi terkait.	Koordinasi Kebijakan, Penguatan edukasi, advokasi, dan sosialisasi	Penguatan edukasi, advokasi, sosialisasi, dan pelatihan	Penguatan edukasi, advokasi, sosialisasi, dan pelatihan Pemantauan dan Evaluasi	Penguatan edukasi, advokasi, sosialisasi, dan pelatihan Pemantauan dan Evaluasi	Penguatan edukasi, advokasi, sosialisasi, dan pelatihan Pemantauan dan Evaluasi	Kementerian Kesehatan
			15) Penguatan keluarga melalui bimbingan perkawinan	200 pasang	200 pasang	200 pasang	200 pasang	200 pasang	Kementerian Agama
		f. Jumlah SDM yang terlatih untuk pencegahan TPPO.	1) Pelatihan dan <i>capacity building</i> SDM (peserta didik, orang tua, pendidik, tokoh agama, penyuluh agama, penghulu, dan masyarakat) dan pemangku kepentingan lainnya.		200 orang	400 orang	400 orang	400 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Agama • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pemuda dan Olahraga

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2) Pelatihan dan <i>capacity building</i> pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial.	1	2	2	2	2	Kementerian Sosial
			3) Pelatihan dan pembekalan kepada calon PMI Awak Kapal Perikanan.			4 kali	4 kali	4 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perhubungan
		g. Jumlah KIE yang disusun dalam upaya pencegahan TPPO.	Penyusunan, diseminasi, dan mengkampanyekan produk-produk KIE dan bahan promosi lainnya di media cetak dan media elektronik secara masif untuk merubah paradigma masyarakat.	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Agama • Kementerian Luar Negeri

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Sosial • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		h. Jumlah model yang disusun untuk upaya pencegahan TPPO di tingkat nasional.	Pembentukan dan pengembangan model-model pencegahan berbasis kearifan lokal.	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Sosial • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		i. Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.	1) Koordinasi pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di daerah.	16 Prov	20 Prov	22 Prov	28 Prov	32 Prov	Kementerian Dalam Negeri
			2) Evaluasi pelaksanaan		16 Prov	20 Prov	22 Prov	28 Prov	32 Prov

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di daerah.						
		j. Tersedianya instrumen untuk pemantauan pelaksanaan standar dan layanan perusahaan penempatan, BLKLN, LPK untuk pencegahan TPPO, pelanggaran hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan	Pengembangan instrumen pemantauan pelaksanaan standar dan layanan perusahaan penempatan, BLKLN/ LPK untuk pencegahan TPPO, pelanggaran hak asasi manusia, dan hak ketenagakerjaan		1 paket (dokumen , SOP)	1 paket (dokumen , SOP)	1 paket (dokumen , SOP)	1 paket (dokumen , SOP)	Kementerian Ketenagakerjaan
		k. Adanya kode etik dan SOP untuk pelaksanaan penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran,	Pengembangan kode etik dan SOP untuk pelaksanaan penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang bebas dari risiko perdagangan		1 paket (dokumen , SOP)	1 paket (dokumen , SOP)	1 paket (dokumen , SOP)	1 paket (dokumen , SOP)	Kementerian Ketenagakerjaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		BLK/ LPK Indonesia yang bebas dari risiko perdagangan orang, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak ketenagakerjaan	orang, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran hak ketenagakerjaan.						
		1. Adanya mekanisme koordinasi untuk pengaduan dan penindakan bagi P3MI, BLKLN, LPK yang melakukan pelanggaran hukum, norma, dan standar.	Penyusunan mekanisme koordinasi untuk pengaduan dan penindakan bagi P3MI, BLKLN, LPK yang melakukan pelanggaran hukum, norma, dan standar.		1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	Kementerian Ketenagakerjaan
		m. Jumlah inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan aparat penegak hukum untuk mencegah	Pelaksanaan inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan penegak hukum di wilayah-wilayah rawan TPPO seperti perusahaan,	Inspeksi bersama	Inspeksi bersama 12 kali Rekomendasi	Inspeksi bersama 12 kali Rekomendasi	Inspeksi bersama 12 kali Rekomendasi	Inspeksi bersama 12 kali Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Kepolisian Republik Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		terjadinya TPPO di perusahaan, perkebunan, pertambangan, perikanan, agen perekrut tenaga kerja, bisnis hiburan dan perhotelan, dll.	perkebunan, pertambangan, perikanan, agen perekrut ketenagakerjaan, perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut, bisnis hiburan dan perhotelan, dll.						
		n. Jumlah situs yang melanggar hukum terkait TPPO yang ditangani berdasarkan laporan K/ L terkait.	Pemutusan informasi (pemblokiran) terhadap situs prostitusi/lowongan kerja/biro jodoh/ situs <i>online</i> lainnya yang diduga menjadi modus TPPO.	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Ketenagakerjaan • Kepolisian Republik Indonesia
		o. Jumlah media yang terlibat dalam mengkampanyekan isu TPPO meningkat.	Penyusunan MoU kerja sama dengan media untuk menyebarkan informasi mengenai TPPO.	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Website	Website	Website	Website	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		p. Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan (P4P)	1) Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M).	30 lokasi	20 lokasi	41 lokasi	44 lokasi	47 lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKH-Perempuan).	9.075 orang	4.790 orang	24.500 orang	25.500 orang	27.500 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			3) Program Desa Vokasi.	30 lokasi	20 lokasi	41 lokasi	44 lokasi	47 lokasi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Penanggung Jawab)

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		q. Jumlah anak putus sekolah dan menjadi pekerja anak menurun.	1) Pemberian beasiswa sekolah ataupun paket penyetaraan dan pemberian materi serta pelatihan keterampilan, agar anak tidak putus sekolah dan bekerja.	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Organisasi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan lain-lain), swasta
			2) Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Keterampilan Wirausaha (PKW).	49061 orang (PKK) 16679 orang (PKW)	50000 orang (PKK) 16676 orang (PKW)	-	-	-	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Penanggung Jawab)
		r. Jumlah calon PMI memahami prosedur migrasi aman.	Kampanye prinsip migrasi yang aman dan penempatan PMI yang prosedural.	45 LTSA (PPTKLN)	45 LTSA (PPTKLN)	45 LTSA (PPTKLN)	45 LTSA (PPTKLN)	45 LTSA (PPTKLN)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		s. Jumlah layanan pemulangan bagi calon PMI/ PMI korban TPPO.	1) Pemulangan PMI.	47.000 orang	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Luar Negeri
			2) Pengawasan keberangkatan dan kepulangan calon PMI/ PMI dengan sosialisasi terhadap Lembaga Sarana Pendukung Penempatan calon PMI.	18.000 PMI untuk pemu- langan PMI	7.300 orang	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		t. Adanya MoU kerja sama Kemnaker, BP2MI dengan Kepolisian Republik Indonesia.	1) Pengamanan jalur keberangkatan/ kepulangan calon PMI/ PMI, penyelidikan, dan penindakan terhadap penempatan calon PMI/ PMI nonprosedural.		1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kepolisian Republik Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2) Memiliki MoU Kerja sama antara BP2MI dengan Polri tentang pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi PMI.			1 paket (dokumen)			<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kepolisian Republik Indonesia
			3) Penyusunan MoU Kerja sama antara Kemnaker dengan Polri tentang pengamanan, penanganan, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI.		1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Kepolisian Republik Indonesia
			4) Penyusunan MoU Kerja sama antara BP2MI dan Pemda		1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			tentang pengawasan, pengamanan dalam proses penempatan dan kepulangan PMI ke daerah asal.						<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah
		u. Adanya pemantauan pada daerah potensi terjadinya TPPO.	1) Pelaksanaan pemantauan dan pencegahan TPPO di bandara, pelabuhan laut, serta perbatasan perairan dan daratan di wilayah yurisdiksi Indonesia.	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	1 paket (juknis, SOP)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Perhubungan • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Republik Indonesia • Badan Intelijen Negara • Kejaksaan • Badan Keamanan Laut
			2) Pelaksanaan pemantauan dan pendalaman jaringan pelaku TPPO terkait WNA.	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Badan Intelijen Negara • Kejaksaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3) Penyampaian masukan dalam pemetaan jaringan pelaku TPPO dalam lingkup nasional maupun internasional.	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	1 paket (dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Badan Intelijen Negara
			4) Pelibatan dalam Satgas TPPO di daerah ataupun melakukan pertukaran informasi dalam forum <i>community watch</i> di perdesaan.	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Republik Indonesia
		v. Identifikasi TPPO di bidang usaha perikanan.	Pelatihan Identifikasi TPPO dalam sektor perikanan.			1 paket (juknis, kegiatan)			Kementerian Kelautan dan Perikanan
		w. UPT Pelabuhan Perikanan dan UPT PSDKP membantu pelayanan pengaduan TPPO.	Peningkatan peran Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan PSDKP pada layanan pengaduan TPPO.			1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		x. Jumlah inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya TPPO di perusahaan, perkebunan, pertambangan, perikanan, agen perekrut tenaga kerja, bisnis hiburan dan perhotelan, dll.	Pelaksanaan inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan penegak hukum di wilayah-wilayah rawan TPPO seperti perusahaan, perkebunan, pertambangan, perikanan, agen perekrut ketenagakerjaan, perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut, bisnis hiburan dan perhotelan, dll.	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Kepolisian Republik Indonesia
		y. Jumlah Pusat Informasi dan Layanan Berbasis Desa untuk Migrasi Aman dan Adil di daerah kantong Pekerja Migran Indonesia.	Pengembangan Pusat Informasi dan Layanan Berbasis Desa untuk Migrasi Aman dan Adil di Kantong Pekerja Migran Indonesia.			1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	Kementerian Ketenagakerjaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		z. Jumlah calon PMI memahami prosedur migrasi aman.	Kampanye prinsip migrasi yang aman dan penempatan PMI yang prosedural.	100.000 CPMI	100.000 CPMI	100.000 CPMI	100.000 CPMI	100.000 CPMI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		aa. Adanya MoU kerja sama BP2MI dengan Kepolisian Republik Indonesia.	1) Pelaksanaan pengamanan jalur keberangkatan/ kepulangan calon PMI/ PMI, penyelidikan, dan penindakan terhadap penempatan calon PMI/ PMI nonprosedural.		Usulan dan draft	Harmonisasi dan finalisasi			Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			2) Penyusunan MoU Kerja sama antara BP2MI dengan Polri tentang pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi PMI.		Pembahasan draft perpanjangan MoU	Harmonisasi dan finalisasi			Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3) Penyusunan MoU Kerja sama antara BP2MI dengan Polri tentang pengamanan, penanganan, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI.		Usulan dan draft	Harmonisasi dan finalisasi			Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			4) Penyusunan MoU Kerja sama antara BP2MI dengan Polri tentang penegakan hukum dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI.		Usulan dan draft	Harmonisasi dan finalisasi			Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			5) Penyusunan MoU Kerja sama antara BP2MI dengan Polri tentang		Usulan dan draft	Harmonisasi dan finalisasi			Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pengawasan, pengamanan dalam proses penempatan dan kepulangan PMI ke daerah asal.						
		bb. Jumlah Penundaan permohonan Dokumen Perjalanan R.I (Paspor) yang diduga sebagai p Indonesia Nonprosedural (PMI-NP).	Penundaan permohonan Paspor terhadap terduga PMI-NP di Kantor Imigrasi.	5900 paspor	5800	5700	5600	5500	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Imigrasi)
		cc. Jumlah penundaan keberangkatan yang diduga sebagai PMI-NP.	Penundaan keberangkatan terduga PMI-NP di TPI (darat, laut, dan udara).	670 orang	645	620	595	570	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		dd. Jumlah kantor imigrasi yang dimonitor dan dievaluasi.	Monitoring dan evaluasi Pencegahan TPPO.	13 (kantor Imigrasi)	12	12	11	11	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		ee. Jumlah Forum Anak berperan sebagai Pelopor	1) Peningkatan kemampuan Forum Anak oleh	1	1	1	1	1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pada bidang TPPO.	Gugus Tugas PPTPPO.						
			2) Menyusun laporan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor di bidang TPPO.	1	1	1	1	1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		ff. Terintegrasi program pencegahan antar kementerian lembaga.	Rapat koordinasi berkala antar anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan lintas Sub Gugus Tugas.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		gg. Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi pencegahan dan partisipasi.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program Sub Gugus Tugas Pencegahan.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sub Gugus Tugas: Rehabilitasi Kesehatan
Koordinator: Kementerian Kesehatan

TANTANGAN (1)	SASARAN STRATEGI (2)	INDIKATOR (3)	AKSI PPTPPO (4)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB (10)
				2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	2024 (9)	
1. Belum tersedianya SDM kesehatan dan anggaran kesehatan yang cukup untuk penanganan korban TPPO yang merata di setiap daerah.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi kesehatan fisik dan psikologis korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi	a. Jumlah kabupaten kota yang mempunyai minimal 4 puskesmas mampu tata laksana KtPA dan TPPO.	Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam tata laksana korban TPPO dengan pendekatan berorientasi pada korban dan responsif gender.	230 Kab/ Kota	270 Kab/ Kota	310 Kab/ Kota	350 Kab/ Kota	390 Kab/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Penanganan rehabilitasi kesehatan fisik dan mental korban TPPO belum terintegrasi antar K/L dan Daerah.	<p>pada korban dan responsif gender.</p> <p>2. Meningkatkan kinerja Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan.</p>	b. Terbangun kesadaran dan pemahaman calon PMI, PMI dan keluarga PMI terkait penyakit menular (IMS, Tuberkulosis, HIV AIDS, hepatitis, dll), penyakit tidak menular, masalah dan gangguan jiwa (gangguan depresi, percobaan bunuh diri, psikotik/ skizofrenia, kekerasan seksual, dsb) serta penyakit akibat kerja.	Sosialisasi mengenai bahaya penyakit menular (IMS, Tuberkulosis, HIV AIDS, Hepatitis dll), penyakit tidak menular, masalah dan gangguan jiwa (gangguan depresi, percobaan bunuh diri, psikotik/ skizofrenia, kekerasan seksual, dsb) serta penyakit akibat kerja di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)/ wilayah deportasi/ kantong PMI/ pertemuan koordinasi pusat dan daerah tentang PMI.	12 prov	18 prov	24 prov	30 prov	34 prov	Kementerian Kesehatan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		c. layanan yang mampu tata laksana penanganan korban TPPO.	1) Menyusun Juknis dan Juklak Tata Laksana Penanganan korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	100%	100%	100%	100%	100%	Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
			2) Melakukan bimtek bagi tenaga kesehatan pemberi layanan korban TPPO.	100%	100%	100%	100%	100%	Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
		d. Jumlah layanan psikologis untuk penanganan korban TPPO.	Penyediaan sarana dan prasarana layanan psikologis untuk penanganan korban TPPO dengan pendekatan yang	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Ikatan Psikolog Klinis Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			berorientasi pada korban dan responsif gender.						
		e. Terintegrasi program rehabilitasi kesehatan antar kementerian lembaga.	Pelaksanaan rapat koordinasi berkala antar anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan dan lintas Sub Gugus Tugas.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		f. Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi rehabilitasi kesehatan.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sub Gugus Tugas: Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial
Koordinator: Kementerian Sosial

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Masih terbatas jumlah fasilitas rumah perlindungan yang berbasis <i>trauma healing</i> dan pemberdayaan korban TPPO. 2. Terbatasnya jumlah tenaga pendamping dan pekerja sosial yang generalis maupun yang spesialis dalam penanganan TPPO dan Korban Tindak Kekerasan (KTK). 3. Masih bervariasi kebijakan terkait lama masa tinggal korban di masing-masing rumah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rehabilitasi sosial korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemulangan korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan reintegrasi sosial korban TPPO dengan	a. Tersedianya data yang komprehensif dan terintegrasi atas lembaga penyedia layanan rehabilitasi sosial.	Pemetaan jumlah penyedia layanan rehabsos korban TPPO (jumlah LKS, mitra kemensos yang menangani KPO di Indonesia termasuk yang menyediakan shelter).	15 LKS 38 BRS	28 LKS 40 BRS	28 LKS 40 BRS	30 LKS 40 BRS	34 LKS 40 BRS	Kementerian Sosial
		b. Tersedianya data terpilah kasus WNI korban TPPO dari luar negeri.	Pengumpulan data terpilah kasus WNI korban TPPO dari luar negeri.	12 kali 100%	12 kali 100%	12 kali 100%	12 kali 100%	12 kali 100%	Kementerian Luar Negeri Kementerian Sosial
		c. Tersedianya data terpilah kasus WNI korban TPPO di dalam negeri.	Pengumpulan data terpilah kasus WNI korban TPPO di dalam negeri.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Kesehatan • Kementerian Dalam Negeri • Kepolisian Republik Indonesia • Badan Pelindungan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
perlindungan di daerah.	pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.								Pekerja Migran Indonesia
4. Masih terdapat kendala koordinasi antara bidang layanan Rehabilitasi Sosial dan Penanganan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban TPPO belum terintegrasi antar K/L dan Daerah.	4. Meningkatkan kinerja Sub Gugus Tugas Rehabilitasi sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sosial.	d. Jumlah korban yang mendapat perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial pemulangan dan Reintegrasi sosial korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	1) Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban TPPO di dalam negeri dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
5. Laporan Sosial menjadi salah satu dasar dalam akses kesehatan mengingat dibutuhkan waktu dalam proses pembuatan BPJS sedangkan kebutuhan layanan sangat mendesak.			2) Pendampingan psikososial korban dalam kasus terkait dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	100% orang	100% orang	100% orang	100% orang	100% orang	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kepolisian Republik Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Laporan Sosial menjadi salah			3) Melakukan revitalisasi bagi rumah	1 Balai Watunas 1 Balai BRSAMPK	1 Balai Watunas 1 BRSAMPK	1 Balai Watunas 1 BRSAMPK	1 Balai Watunas 1 BRSAMPK	1 Balai Watunas 1 BRSAMPK	Kementerian Sosial

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>satu pertimbangan dalam pendampingan korban TPPO dalam pemenuhan haknya (termasuk persidangan).</p> <p>7. Belum optimalnya jumlah Jabatan/ SDM Profesional Penyuluh Sosial di dalam proses pemulangan dan Reintegrasi Korban TPPO dengan target sasaran keluarga dan lingkungan.</p> <p>8. Dibutuhkannya keterpaduan Program Perlindungan Jaminan Sosial dalam penanganan TPPO dan Korban Tindak kekerasan</p>			perlindungan (RPTC, RPSW, RPSA).	2 RPTC Pusat 19 RPTC Daerah	2 RPTC Pusat 19 RPTC Daerah	2 RPTC Pusat 19 RPTC Daerah	2 RPTC Pusat 19 RPTC Daerah	2 RPTC Pusat 19 RPTC Daerah	
			4) Laporan Sosial sebagai Pengganti BPJS.	41 Balai Rehabsos	41 Balai Rehabsos	41 Balai Rehabsos	41 Balai Rehabsos	41 Balai Rehabsos	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Dalam Negeri • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
			5) Laporan Sosial sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pendampingan proses Hukum korban TPPO dan Korban Tindak Kekerasan (KTK).	41 Balai Rehabsos	41 Balai Rehabsos	41 Balai Rehabsos	41 Balai Rehabsos	41 Balai Rehabsos	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Dalam Negeri • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
			6) Pelaksanaan wawancara identifikasi WNI terindikasi korban TPPO di Perwakilan RI dengan pendekatan yang berorientasi	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Luar Negeri

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
dengan Gugus Tugas.			pada korban dan responsif gender.						
		e. Jumlah lembaga layanan yang memberikan pelayanan meningkat.	Penerimaan rujukan dan melakukan rujukan korban.	3	5	6	6	6	<ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian Republik Indonesia • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		f. Jumlah lembaga memiliki Standar penanganan rehabilitasi sosial dan reintegrasi korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi	Penyusunan SOP Penanganan Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial Korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Kesehatan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pada korban dan responsif gender.							
		g. Tersedianya panduan model pemulihan korban TPPO secara menyeluruh, termasuk panduan rehabilitasi sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	1) Penyusunan buku panduan penanganan pemulihan korban TPPO secara menyeluruh, termasuk panduan rehabilitasi sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	3 kali	2 kali	1 kali	3 kali	3 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			2) Penyusunan standardisasi Laporan penanganan rehabilitasi sosial dan reintegrasi oleh psikolog klinis.	3 kali	2 kali	1 kali	3 kali	3 kali	Kementerian Kesehatan
		h. Tersedianya Permensos Rehabilitasi	Penyusunan Permensos rehabilitasi sosial	3 kali	2 kali	1 kali	3 kali	3 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sosial korban TPPO di RPTC.	korban TPPO di RPTC.						
		i. Jumlah tenaga terampil dan terlatih dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi meningkat.	1) Pelaksanaan pelatihan penanganan rehabilitasi sosial dan reintegrasi bagi peksos, psikolog klinis, dan tenaga pendamping lain di lingkungan Kemensos.	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Kementerian Sosial
			2) Penyelenggaraan pelatihan identifikasi korban TPPO bagi pejabat dan staf Kementerian Luar Negeri.						Kementerian Luar Negeri
		j. Jumlah layanan Rumah Aman dan rehabsos korban TPPO baik anak, perempuan maupun laki-laki dengan	Pembangunan sarana dan prasarana RPSA, RPTC dan RPSW terutama di wilayah transit dan perbatasan.		5 RPTC yang tutup direvitalisasi 2 RPTC Pusat dibentuk Balai	6 RPTC 6 RPTC Kab./ Kota	6 RPTC Kab./ Kota	6 RPTC Kab./ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kementerian Dalam Negeri

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.			(Tanjung Pinang dan Bambu Apus)				
		k. Jumlah lembaga-lembaga penyedia layanan rehabilitasi sosial pemulangan dan reintegrasi sosial berkompetensi menangani korban TPPO baik lembaga layanan anak, perempuan dan laki laki.	Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga penyedia layanan korban TPPO mitra Kemensos.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan
		l. Jumlah pekerja sosial yang ahli di bidangnya seperti pengacara, pskiater dan psikolog klinis pada RPSA,	Pelaksanaan pelatihan kepada Pekerja Sosial dan penambahan jumlah pekerja sosial yang ahli dibidangnya seperti pengacara, pskiater dan psikolog pada RPSA, RPTC, dan RPSW.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Pemerintah Daerah • Kementerian Kesehatan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		RPTC, dan RPSW.							
		m. Jumlah PMI purna yang sejahtera.	Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terutama bagi PMI purna secara berkelanjutan.	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Ketenagakerjaan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		n. Jumlah desa dan kelompok masyarakat dalam program reintegrasi korban TPPO.	1) Penyusunan Modul RBM dalam penanganan TPPO.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Sosial
			2) Pembentukan <i>Pilot Project</i> Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) dalam penanganan TPPO.	2 lokasi (Bogor dan NTT)	2 lokasi (Indramayu dan Palu)	1 lokasi (Madura dan Jatim)	1 lokasi (Blitar)	1 lokasi (Jawa Tengah dan Sumatera Utara)	Kementerian Sosial
		o. Jumlah kerja sama dengan sektor untuk program	Penyusunan dan penandatanganan MoU dengan dunia usaha untuk program (re)integrasi	2 lemb 2 MoU dengan pihak	2 lemb 3 MoU dengan pihak	2 lemb 4 MoU dengan pihak	2 lemb 5 MoU dengan pihak	2 lemb 5 MoU dengan pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi korban TPPO.	sosial dan pemberdayaan korban.	swasta, e-commerce BUMN	swasta, e-commerce BUMN	swasta, e-commerce BUMN	swasta, e-commerce BUMN	swasta, e-commerce BUMN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		p. Jumlah <i>survivor</i> TPPO yang menjadi wirausaha.	1) Pelaksanaan pendataan <i>survivor</i> TPPO yang menjadi wirausaha.	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Pemuda dan Olahraga
			2) Peningkatan kapasitas para <i>survivor</i> wirausaha untuk menjadi <i>peer educator</i> korban TPPO lainnya.	50 org 1 paket Pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui program ATENSI (asistensi rehabilitasi sosial)	50 org 1 paket Pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui program ATENSI (asistensi rehabilitasi sosial)	50 org 1 paket Pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui program ATENSI (asistensi rehabilitasi sosial)	50 org 1 paket Pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui program ATENSI (asistensi rehabilitasi sosial)	50 org 1 paket Pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui program ATENSI (asistensi rehabilitasi sosial)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		q. Jumlah PMI purna yang menjadi wirausaha.	1) Pelaksanaan pemberdayaan terintegrasi.	0	2.000	2.400	2.800	3.200	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			2) Penguatan Desa Migran produktif pada daerah kantong-kantong penempatan Pekerja Migran Indonesia.	49	49	49	49	49	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		r. Jumlah PMI terlindungi dari pra, masa, dan purna PMI purna bermasalah.	1) Pengembangan dan Optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap untuk Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran di Kabupaten Kantong PMI.		1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			2) Pelaksanaan koordinasi untuk layanan terpadu pelindungan dan penempatan PMI dengan		1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			melibatkan <i>Women Crisis Center</i> , Organisasi Pekerja Migran dan Serikat Pekerja.						
			3) Pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi PMI purna bermasalah.	17.382	18.000	14.000	13.000	10.500	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			4) Pelaksanaan reintegrasi sosial (pembagian peran dan fungsi K/ L terkait dalam penanganan PMI Purna Bermasalah) bersama Pemerintah Pusat dan Daerah (Dinkes, Dinsos, Disnaker, Disdukcapil,	Program Reintegrasi sosial – NTB dan Indramayu Kemensos	Program Reintegrasi sosial – (Indramayu dan Palu) Kemensos	Program Reintegrasi sosial – (Madura Jatim) Kemensos	Program Reintegrasi sosial – (Blitar) Kemensos	Program Reintegrasi sosial – (Jawa Tengah dan Sumatera Utara) Kemensos	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Ketenagakerjaan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			BPJS, Dinas PPPAKB).						<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
		s. Jumlah korban mendapatkan layanan pemulangan.	Pemulangan korban dari tempat kejadian ke daerah asal.	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Perhubungan
		t. Ada SOP pemulangan korban TPPO dari luar ke dalam negeri dan/atau dari daerah tujuan ke daerah asal.	1) Penyusunan SOP pemulangan korban TPPO dari titik debarkasi ke daerah asal.	4 kali pertemuan	4 kali diseminasi	4 kali sosialisasi	4 kali sosialisasi	4 kali sosialisasi	Kementerian Sosial
			2) Pengawasan keberangkatan dan kepulangan calon PMI/PMI dengan sosialisasi terhadap Lembaga Sarana Pendukung Penempatan calon PMI.		Draft SOP	Harmonisasi dan finalisasi			<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
							Usulan SOP	Finalisasi	

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3) Penyediaan pendampingan korban TPPO.						<ul style="list-style-type: none"> Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
				90% terlindungi 10% layanan rehabilitasi psikologis dan psikososial	90% terlindungi 10% layanan rehabilitasi psikologis dan psikososial	90% terlindungi 10% layanan rehabilitasi psikologis dan psikososial	90% terlindungi 10% layanan rehabilitasi psikologis dan psikososial	90% terlindungi 10% layanan rehabilitasi psikologis dan psikososial	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		u. Jumlah korban yang mendapatkan bantuan Reintegrasi sosial.	Pemberian pelatihan keterampilan korban TPPO.	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sosial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		v. Jumlah penyintas TPPO terlayani melalui usaha kemandirian.	1) Pemberian bimbingan sosial dan stimulan usaha kemandirian bagi penyintas TPPO Perdagangan Orang.	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	1000 org	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			2) Pemberian Bantuan Program Kesejahteraan Sosial bagi Anak Korban	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Sosial

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Perdagangan Orang.						
		w. Jumlah korban TPPO yang mendapatkan program Reintegrasi sosial.	1) Pendataan jumlah korban TPPO yang telah mendapatkan program Reintegrasi sosial.	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Sosial
			2) Sosialisasi kepada masyarakat/ pokja tentang TPPO.	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Kementerian Sosial
			3) Fasilitasi penyiapan keluarga/ keluarga pengganti.	100%	100%	100%	100%	100%	Kementerian Sosial
			4) Fasilitasi korban untuk kembali ke dunia pendidikan (formal/ non-formal).	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		x. Terintegrasi program rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial antar K/ L.	Pelaksanaan rapat koordinasi berkala antar anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sosial dan lintas Sub Gugus Tugas.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		y. Laporan <i>monitoring</i> , evaluasi rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> , evaluasi program, dan penyusunan laporan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sosial.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sub Gugus Tugas: Pengembangan Norma Hukum
 Koordinator: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Belum proaktif dalam melakukan reviu dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait TPPO. 2. Belum harmonisnya peraturan perundang-undangan antar kementerian dan lembaga dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO. 3. Belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan restitusi (mengingat secara garis besar	1. Meningkatkan mutu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO. 2. Meningkatkan kinerja Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum.	a. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum tentang perundangan dan kebijakan yang sudah ada terkait TPPO.	Reviu perundangan dan kebijakan yang sudah ada terkait TPPO, mensinergikan Undang-Undang TPPO dan kebijakan lainnya sejalan dengan Konvensi di tingkat regional dan international yang telah diratifikasi oleh Indonesia terkait TPPO.	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		b. Disahkannya RUU KUHP.	Sosialisasi dan pembahasan RUU KUHP.		Sosialisasi 12 kota	pembahasan	pembahasan	pembahasan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		c. Tersusun Naskah Akademik tentang Pengesahan Optional Protokol Konvensi tentang Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman	Penyusunan Bahan Naskah Akademik tentang Pengesahan Optional Protokol Konvensi tentang Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di BPHN.		1 paket (dokumen, kegiatan)				

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur tentang restitusi).		lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.							
		d. Persentase korban WNA yang ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan.	Layanan bagi WNA korban Perdagangan Orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia untuk ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan dengan perlakuan khusus dan berbeda.		100%	100%	100%	100%	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		e. Terbitnya regulasi baru untuk pembiayaan layanan kesehatan (medis, psikologis, dan medikolegal) korban TPPO.	Penyusunan regulasi untuk pembiayaan layanan kesehatan (medis, psikologis, dan medikolegal) korban TPPO.	1 Permen	1 Permen	1 Permen	1 Permen	1 Permen	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		f. Adanya peraturan atau <i>guidelines</i> terkait etika penyiaran dan jurnalistik kasus TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	Penyusunan peraturan atau <i>guidelines</i> terkait etika penyiaran dan jurnalistik kasus TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.		1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)			<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dewan Pers
		g. Adanya peraturan menteri tentang standar operasional prosedur pelayanan	Penyusunan peraturan menteri tentang standar operasional prosedur pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.						
		h. Adanya kebijakan pendataan terpadu TPPO, termasuk terkait perlindungan dan mekanisme pendistribusian data guna melindungi privasi data korban TPPO.	Penyusunan kebijakan pendataan terpadu TPPO, termasuk terkait perlindungan dan mekanisme pendistribusian data guna melindungi privasi data korban TPPO.	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		i. Diterapkan peraturan Kejaksaan terkait sita harta untuk restitusi.	Penyusunan MoU atau SOP mengenai perampasan aset untuk restitusi.			1 MoU			<ul style="list-style-type: none"> Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kepolisian Republik Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		j. Terbit peraturan tentang restitusi untuk kasus yang sudah inkrah.	Penyusunan Peraturan tentang restitusi untuk kasus yang sudah inkrah.			1 paket (dokumen, kegiatan)			Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		k. Terintegrasi program antar kementerian lembaga.	Pelaksanaan rapat koordinasi lintas Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		l. Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengembangan norma hukum.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum.		1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sub Gugus Tugas: Penegakan Hukum
 Koordinator: Kepolisian Negara Republik Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Belum merata pemahaman dan persepsi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPO. 2. Belum ada mekanisme penetapan penyitaan terhadap aset pelaku TPPO (pelaku tidak memberikan restitusi langsung). 3. Masih bervariasi data korban TPPO menyebabkan aparat penegak hukum	1. Meningkatkan kapasitas penegak hukum dan kualitas penanganan hukum perkara TPPO serta pemenuhan hak-hak hukum korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender. 2. Meningkatkan kemampuan dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang berperspektif korban dan sensitif gender.	a. Jumlah APH yang memiliki kapasitas tentang TPPO.	1) Evaluasi pelatihan penguatan kapasitas APH.	3 Regional	3 Regional	3 Regional	3 Regional	3 Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia
			2) Advokasi bagi pengambil keputusan di jajaran APH dalam penanganan TPPO.	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia • Tentara Nasional Indonesia
			3) Sosialisasi bagi aparat penegak hukum tentang penanganan hukum perkara TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	3 Regional	3 Regional	3 Regional	3 Regional	3 Regional	Kepolisian Republik Indonesia
				6 kali 6 wilayah	6 kali 6 wilayah	6 kali 6 wilayah	6 kali 6 wilayah	6 kali 6 wilayah	Kejaksaan Republik Indonesia
				Personil dari 3 zona	Personil dari 3 zona	Personil dari 3 zona	Personil dari 3 zona	Personil dari 3 zona	Badan Keamanan Laut
			4) Pelatihan bagi APH (Penyidikan, Penuntutan, dan	3 Regional	3 Regional	3 Regional	3 Regional	3 Regional	Kepolisian Republik Indonesia
				1 setahun	1 setahun	1 setahun	1 setahun	1 setahun	Kejaksaan Republik Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti kasus korban.</p> <p>4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran korban dan masyarakat untuk menjaga barang bukti, sehingga kasus TPPO seringkali sulit diproses.</p> <p>5. Kurangnya pemahaman masyarakat termasuk korban bahwa dirinya menjadi korban TPPO.</p>	<p>3. Meningkatkan Kinerja Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum dan adanya laporan persemester Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum.</p> <p>4. Meningkatkan Kinerja Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan Pihak Pelapor untuk mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan Berasal dari TPPO</p> <p>6. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dengan provinsi, dan kabupaten/</p>		<p>Pemeriksaan di Sidang Pengadilan) dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.</p>	Personil dari 3 zona	Personil dari 3 zona	Personil dari 3 zona	Personil dari 3 zona	Personil dari 3 zona	Badan Keamanan Laut
			<p>5) Pelatihan bagi pengawas perikanan, syahbandar, syahbandar perikanan dan aparat penegak hukum lainnya dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO sektor kelautan dan perikanan.</p>			1 pelatihan setahun	1 pelatihan setahun	1 pelatihan setahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia
			<p>6) Sosialisasi kepada masyarakat tentang TPPO.</p>	7 Regional	7 Regional	7 Regional	7 Regional	7 Regional	Keolisian Republik Indonesia
			<p>7) Pendampingan bagi korban dan keluarganya</p>	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	Kejaksanaan Republik Indonesia
				500 Kegiatan	520 Kegiatan	540 Kegiatan	560 Kegiatan	580 Kegiatan	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kota, termasuk dengan, baik dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, OMS/ LSM dan dunia usaha.		(proses peradilan) dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.						
	7. Meningkatkan Kerja sama lintas batas negara dalam penanganan perkara TPPO dan Pertukaran Informasi		8) Perlindungan terhadap saksi, korban, dan keluarganya (sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014) dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	500 Kegiatan	520 Kegiatan	540 Kegiatan	560 Kegiatan	580 Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kepolisian Republik Indonesia
			9) Kerja sama bilateral dalam rangka penanganan dan perlindungan saksi dan korban lintas negara.	1 Paket (dokumen, kegiatan)	1 Paket (dokumen, kegiatan)	1 Paket (dokumen, kegiatan)	1 Paket (dokumen, kegiatan)	1 Paket (dokumen, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Luar Negeri Kepolisian Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
				3 Regional	3 Regional	3 Regional	3 Regional	3 Regional	Kepolisian Republik Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			10) Pelatihan tingkat lanjut bagi aparat penegak hukum terkait penyidikan dan penuntutan korporasi dan pidana lain yang bersinggungan dengan TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kejaksaan Republik Indonesia Badan Keamanan Laut
			11) Pelatihan Analisis Transaksi Keuangan terkait TPPO Bagi Analis PPATK/ Pihak Pelapor/ Lembaga Penegak Hukum.		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		b. Jumlah Strategi, KIE, panduan teknis untuk peningkatan kualitas APH dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	1) Penyusunan strategi peningkatan kualitas APH berdasarkan hasil evaluasi pelatihan.	4 paket (dokumen, kegiatan)	4 paket (dokumen, kegiatan)	4 paket (dokumen, kegiatan)	4 paket (dokumen, kegiatan)	4 paket (dokumen, kegiatan)	Kepolisian Republik Indonesia
			2) Penyusunan bahan KIE bagi APH yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	Kepolisian Republik Indonesia
				Website sharing Knowledge Platform	Website sharing Knowledge Platform	Website sharing Knowledge Platform	Website sharing Knowledge Platform	Website sharing Knowledge Platform	Kejaksaan Republik Indonesia
			3) Penyusunan panduan teknis yang responsif gender dan peduli perempuan serta anak untuk APH.	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	Kepolisian Republik Indonesia
				3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	Kejaksaan Republik Indonesia
		c. Jumlah Satgas Penanganan TPPO Daerah.	Pembentukan Satgas Penanganan TPPO Daerah yang belum terbentuk dan mengaktifkan serta meningkatkan kinerja Satgas Penanganan TPPO	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	Kepolisian Republik Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Daerah yang telah terbentuk.						
		d. Tersedia kurikulum pelatihan bagi Polisi, Jaksa dan Hakim yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	Penyusunan kurikulum pelatihan bagi Polisi, Jaksa, dan Hakim bersama dengan badan diklat masing-masing instansi yang berorientasi pada korban dan responsif gender.	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	Kepolisian Republik Indonesia
				3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	Kejaksaan Republik Indonesia
		e. Tersedia kurikulum pelatihan bagi Analis PPATK, Pihak Pelapor dan Lembaga Penegak Hukum.	Penyusunan kurikulum pelatihan bagi Analis PPATK, Pihak Pelapor dan Lembaga Penegak Hukum.	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		f. Laporan <i>monitoring</i> penanganan perkara TPPO yang ditangani aparat penegak hukum di tingkat daerah.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> secara berkala terkait penanganan TPPO yang ditangani aparat penegak hukum terutama di tingkat daerah.	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		g. Jumlah aparat hukum memahami mekanisme	Sosialisasi juknis restitusi.	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	• Kepolisian Republik Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pengajuan restitusi.							<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		h. Jumlah kelompok masyarakat sadar untuk terlibat secara aktif memerangi kasus TPPO, antara lain melaporkan dugaan kasus TPPO.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 kepada masyarakat di daerah rawan TPPO.	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	<ul style="list-style-type: none"> Kepolisian Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
				6 kali per wilayah	6 kali per wilayah	6 kali per wilayah	6 kali per wilayah	6 kali per wilayah	Kejaksaan Republik Indonesia
				Relawan Penjaga Laut	Relawan Penjaga Laut	Relawan Penjaga Laut	Relawan Penjaga Laut	Relawan Penjaga Laut	Badan Keamanan Laut
		i. Laporan data pilah pelaku dan korban TPPO secara terpadu.	Pengumpulan/pendataan data pilah pelaku dan korban TPPO secara terpadu.	1 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Kepolisian Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perhimpunan Advokat Indonesia
		j. Persentase korban yang mendapatkan restitusi.	Fasilitasi korban untuk mendapatkan restitusi.	150 korban	175 korban	200 korban	225 korban	250 korban	<ul style="list-style-type: none"> Kepolisian Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		k. Persentase perampasan aset pelaku TPPO (individual dan korporasi).	1) Pelaksanaan perampasan aset pelaku TPPO (individual dan korporasi).	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia
			2) Penyampaian Hasil Penelusuran Aset dalam Rangka penanganan TPPO.	100%	100%	100%	100%	100%	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		l. Adanya Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Berkaitan TPPO.	Penyusunan Surat Edaran tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan berkaitan TPPO.	-	-	1 dokumen	-	-	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		m. Adanya MoU kerja sama PPATK dengan BP2MI.	Penyusunan MoU Kerja sama antara PPATK dan BP2MI tentang Pertukaran Informasi.			1			Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		n. Adanya pertukaran informasi antar PPATK, BP2MI, Lembaga Penegak Hukum.	PPATK menyampaikan Laporan Hasil Analisis Proaktif/ Memenuhi Permintaan Informasi terkait Kasus TPPO.		Statistik Pertukaran Informasi	Statistik Pertukaran Informasi	Statistik Pertukaran Informasi	Statistik Pertukaran Informasi	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		o. Terintegrasi program penegakan hukum antar kementerian lembaga.	Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala antar anggota Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum dan lintas Sub Gugus Tugas.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		p. Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi penegakan hukum.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum.		1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Sub Gugus Tugas: Koordinasi dan Kerja Sama
 Koordinator: Kementerian Ketenagakerjaan

TANTANGAN (1)	SASARAN STRATEGI (2)	INDIKATOR (3)	AKSI PPTPPO (4)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB (10)
				2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	2024 (9)	
1. Belum semua Kementerian/ Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya koordinasi dan kerja sama TPPO. 2. Belum Optimalnya Rapat koordinasi antar Sub Gugus Tugas tidak dilakukan secara rutin karena Gugus Tugas masih dianggap sebagai tugas tambahan. 3. Pemulangan korban TPPO dari tempat tujuan atau transit masih terkendala	1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dengan provinsi, dan kabupaten/ kota, termasuk dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, OMS/ LSM dan dunia usaha. 2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama pencegahan dan penanggulangan TPPO antar pemangku kepentingan di tingkat regional dan internasional baik antar pemerintah maupun antara	a. Terintegrasi program Pencegahan dan Penanganan korban TPPO lintas sektor.	Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		b. Jumlah MoU antar pemerintah daerah tingkat provinsi, Kabupaten, dan kota.	Penandatanganan MoU baru dan pembaharuan MoU yang telah habis masa berlakunya antar Pemda asal, transit, dan tujuan.		11 MoU	10 MoU	10 MoU	10 MoU	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah (daerah asal, transit, tujuan)
		c. Jumlah kerja sama antar kementerian lembaga.	Penandatanganan MoU baru dan pembaharuan MoU yang telah habis masa berlaku antar kementerian lembaga.	1 MoU	2 MoU	3 MoU	4 MoU	5 MoU	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		d. Jumlah kerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian.	Penyusunan MoU dengan Lembaga penelitian/ Universitas untuk program-program terkait TPPO.	1 MoU	2 MoU	3 MoU	4 MoU	5 MoU	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator dan Anggota Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perguruan Tinggi

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
				2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4. Belum optimalnya tindak lanjut MoU terkait TPPO yang telah dilakukan antar provinsi dan antar negara.	pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait, seperti: organisasi internasional, NGO/ INGO, akademisi maupun dunia usaha”).	e. Jumlah MoU kerja sama dengan BUMN untuk meningkatkan pemahaman mengenai TPPO dan mencegah TPPO di perusahaan-perusahaan BUMN.	Penyusunan MoU dan pedoman untuk mencegah dan menangani TPPO dalam rantai pasokan bisnis BUMN dan Swasta.	1 paket (Kemen BUMN) (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 	
		f. Terselenggaranya/ hadir pada pertemuan terkait TPPO di tingkat kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.	Menghadiri berbagai pertemuan di ASEAN (khususnya SOM-TC), <i>Bali Process</i> dan forum terkait lainnya di kawasan		1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan 	
	3. Meningkatkan kinerja Sub Gugus Tugas koordinasi dan kerja sama.	g. Jumlah MoU kerja sama dengan pihak perbankan dan dunia usaha terkait dengan program pemberdayaan korban TPPO.	1) Penyusunan MoU dengan perbankan dan dunia usahanya untuk program pemberdayaan korban TPPO.		1 MoU	2 MoU	3 MoU	4 MoU	5 MoU	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Swasta
			2) Penyusunan MoU dengan perbankan.		1 MoU (BNI)	1 MoU				Kementerian Ketenagakerjaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		h. Jumlah MoU kerja sama dengan pusat pelatihan dan pendidikan milik instansi pemerintah untuk menyusun kurikulum penanganan TPPO bagi aparatur sipil dan aparatur hukum.	Penyusunan MoU dengan Badan Diklat milik pemerintah.		1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	Kementerian Ketenagakerjaan
		i. Jumlah pertemuan bilateral, regional, dan multilateral yang dihadiri Pemerintah RI.	1) Negosiasi dan berperan aktif dalam kerja sama bilateral, regional, dan multilateral terkait TPPO.	MoU kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri Australia dengan LPSK tentang kerja sama peningkatan kapasitas dalam mengembangkan perlindungan saksi dan korban 2 pertemuan bilateral (PPTKLN)	MoU Kemnaker dan Korea & Jepang (PPTKLN)	2 pertemuan bilateral (PPTKLN)	2 pertemuan bilateral (PPTKLN)	2 pertemuan bilateral (PPTKLN)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Ketenagakerjaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2) Pelaksanaan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak		1 paket Regional (juknis, kegiatan)	1 paket Regional (juknis, kegiatan)	1 paket Regional (juknis, kegiatan)	1 paket Regional (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan
			3) Kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri Australia dengan LPSK tentang kerja sama peningkatan kapasitas dalam mengembangkan perlindungan saksi dan korban.	1 MoU	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Kementerian Luar Negeri

TANTANGAN (1)	SASARAN STRATEGI (2)	INDIKATOR (3)	AKSI PPTPPO (4)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB (10)
				2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	2024 (9)	
		j. Jumlah inisiatif penyusunan dan perundingan perjanjian internasional.	1) Negosiasi dan berperan aktif dalam rangka menginisiasi perjanjian bilateral, regional, dan multilateral terkait perlindungan korban dan penanganan kasus TPPO.	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	Kementerian Luar Negeri
			2) Perjanjian bilateral.	2 pertemuan (Korea, Jepang)	2 pertemuan	2 pertemuan	2 pertemuan	2 pertemuan	
		k. Terintegrasi program kerja sama dan koordinasi antar kementerian lembaga.	Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala antar anggota Sub Gugus Tugas Kerja sama dan Koordinasi dan lintas Sub Gugus Tugas.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi koordinasi dan kerja sama.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program sub gugus tugas kerja sama dan koordinasi.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sekretariat
Koordinator: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Belum optimal manajemen penanganan Pencegahan dan Penanganan TPPO.	1. Meningkatkan mutu fungsi kesekretariatan dalam koordinasi pelaksanaan Gugus Tugas. 2. Menyusun <i>database</i> Pencegahan dan Penanganan TPPO di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/ kota, dengan menjunjung tinggi asas kerahasiaan data.	a. Jumlah rapat koordinasi berkala yang difasilitasi.	1) Pelaksanaan rapat koordinasi nasional lintas kementerian lembaga Gugus Tugas.		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2) Pelaksanaan koordinasi Sub Gugus Tugas, minimal 2 kali pertahun.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			3) Pelaksanaan rapat koordinasi khusus minimal 2 kali pertahun.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			4) Koordinasi pelaksanaan konferensi/ temu pers secara berkala.		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		b. Terlaksana Forum bedah kasus TPPO yang krusial.	Pelaksanaan bedah kasus dan konferensi kasus merespon perkara yang krusial.		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		c. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pembentukan dan penguatan Gugus Tugas.	1) Sosialisasi dan advokasi kepada provinsi dan kabupaten kota untuk pembentukan dan penguatan Gugus Tugas.		34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
			2) Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan untuk Layanan yang Berkualitas, berpusat pada korban, dan Terkoordinasi.						
		d. Jumlah daerah yang mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan.	2 regional, 34 prov	2 regional, 34 prov	2 regional, 34 prov	2 regional, 34 prov	2 regional, 34 prov	Kementerian Dalam Negeri
		e. Adanya Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Penyusunan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	Kementerian Dalam Negeri

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		f. Jumlah diseminasi panduan penyusunan Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah.	1) Diseminasi panduan penyusunan GT dan RAD tingkat provinsi dan kabupaten/ kota		34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2) Fasilitasi penyusunan RAD.		34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri
		g. Jumlah supervisi terhadap kelembagaan GT di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.	1) Pelaksanaan <i>monitoring</i> berkala fungsi kelembagaan GT TPPO.		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2) Pelaksanaan bimtek terhadap anggota Gugus Tugas pusat dan daerah.		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri
			3) Melakukan pelatihan bagi anggota Gugus Tugas.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		h. Laporan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas.	1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gugus Tugas PPTPPO.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2) Melakukan <i>monitoring</i> atas laporan triwulan Sub Gugus Tugas.		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			3) Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Lima Tahunan Gugus Tugas PPTPPO.		1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			4) Penyusunan laporan insidentil kasus TPPO.		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5) Koordinasi penyusunan KIE.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		i. Jumlah koordinasi teknis dan evaluasi	1) Penyelenggaraan Rakornas GT PPTPPO.		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pelaksanaan GT secara keseluruhan.	2) Publikasi laporan Rakornas melalui <i>website</i> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		j. Tersedia <i>database</i> yang komprehensif dan terintegrasi, di pusat, daerah provinsi, dan daerah.	1) Pembentukan Satu Data TPPO yang terintegrasi.		Usul-an	Pemba- hasan	MoU	PKS	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Luar Negeri • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2) Pembentukan kliring data TPPO di daerah.		Usul-an	Pemba- hasan	MoU	PKS	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri
			3) Memperkuat SIMFONI PPA sebagai penghimpun data TPPO.		1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Luar Negeri • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			4) Fasilitasi kementerian, lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/ kota dalam pengumpulan data dan informasi kasus-kasus TPPO.		34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri
		k. Jumlah pengisian <i>database</i> TPPO yang terintegrasi.	1) Sosialisasi panduan pengisian <i>database</i> terintegrasi.		12 paket (juknis, kegiatan)	12 paket (juknis, kegiatan)	12 paket (juknis, kegiatan)	12 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Luar Negeri • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Pelindungan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pekerja Migran Indonesia
			2) Pembaruan data secara berkala.		12 paket (juknis, kegiatan)	12 paket (juknis, kegiatan)	12 paket (juknis, kegiatan)	12 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Luar Negeri • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		1. Laporan analisa data yang diperbaharui secara berkala.	Penyusunan analisa data yang masuk ke dalam Satu Data secara berkala.		12 paket (dokumen, kegiatan)	12 paket (dokumen, kegiatan)	12 paket (dokumen, kegiatan)	12 paket (dokumen, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • Kepolisian Republik Indonesia • Kejaksaan Republik Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia